

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024
(STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNG TOAR)**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara*



OLEH:

TIARA ETIKA SARI

NPM. 2104111056

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2024 (Studi Kasus Di Kecamatan
Gunung Toar)

Nama Mahasiswa : TIARA ETIKA SARI

NPM : 210411056

Fakultas : ILMU SOSIAL

Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH DOSEN PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS, S.Sos.M.Si
NIDN.1002059002

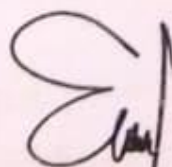


SAHRI MUHARAM, S.Sos.M.Si
NIDN.1021117906

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Negara

Universitas Islam Kuantan Singingi



PENGESAHAN

Diperiksa Dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi

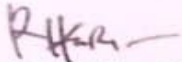
Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada
Hari : Kamis
Tanggal : 15
Bulan : Mei
Tahun : 2025

Tim Penguji

Ketua,



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN: 1030058402

Sekretaris,



Sahri Muharam, S.Sos., M.Si
NIDN: 1021117906

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Emilia Emharis, S.Sos. M.Si | (Pembimbing I) |
| 2. Sahri Muharam, S.Sos. M.Si | (Pembimbing II) |
| 3. Desriadi, S.Sos., M.Si | (Anggota) |
| 4. Sarjan M, S.Sos., M.Si | (Anggota) |

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

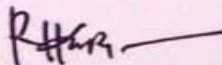
Mengetahui

Fakultas Ilmu

Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan,



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN: 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIARA ETIKA SARI

Npm : 210411056

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Sarjana, magister, dan Doktor) .baik di Universitas Islam kuantan Singingi maupun di perguruan tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan,dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian- bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain,telah saya tulis orang lain, telah saya tulis sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpanan dan tidak kebenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun

Teluk Kuantan, 11 Maret 2025



TIARA ETIKA SARI
NPM.210411056

MOTTO

*“Hidup itu bukan hanya berjuang lalu sukses sendiri, hidup adalah berjuang
untuk membantu orang lain mendapatkan kesuksesannya”*

(Tiara Etika Sari)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin..

Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan selalu dalam lindungan-Nya. Semoga ini menjadi salah satu langkah untuk menuju kesuksesan dan meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Cahaya Hidupku ayah dan ibuku tercinta, yang selalu memberiku semangat dan selalu mendoakan putrimu dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk ayah dan ibu pengorbananmu sungguh luar biasa. Serta adik tersayang wirda ningsih yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan

Untuk temanku yang sama-sama berjuang (putra hanapi,sely,rani) terima kasih kalian selalu ada untukku, semangat dari kalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih juga kepada orang-orang terdekat yang selalu mendukung hingga sampai saat ini.

Terima kasih banyak untuk bapak Emilia emharis S.Sos M.Si dan bapak Sahri muharam S.Sos M.Si yang telah banyak meluangkan waktu tenaga dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat dan bantuan dalam proses pembimbingan. Dan kepada bapak dan ibu dosen pengajar serta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, bantuan administrasi dan bantuan lainnya dalam kelancaran studi peneliti..

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin..

Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas PUPR (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.

Meskipun penulis berharap isi dari skripsi penelitian ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada kekurangan dan kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan, serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang mana diantaranya kepada :

1. Ibu Dr.Ikrima Mailani,S.pd.i.,M.pd.i selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibuk Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Emilia Emharis S.Sos,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan materi, serta doa yang tiada henti bagi penulis.
5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan semangat dan dukungan selama masa studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian tentang Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

Teluk Kuantan ,Maret 2025

Penulis

Tiara Etika Sari
210411056

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DINAS PUPR (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNG TOAR) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

Tiara Etika Sari
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

ABSTRAK

Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat Sebagian besar daerah-daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun formal. Pembangunan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tekknik pengumpulan data melalui observasi. Diketahui bahwa pemerintah daerah Kecamatan Gunung Toar sudah memenuhi pedoman RPJM. Hal tersebut dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam hal melakukan pembangunan jalan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan gunung toar sudah berjalan dengan baik dan sudah di laksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan sesuai yang di inginkan baik itu dari dinas PUPR maupun dari pihak pemerintah sudah melaksanakan pembangunan di kecamatan gunung toar dengan baik.

Kata kunci : *Peran Pemerintah, Pembangunan Infrastruktur Jalan*

***REGIONAL GOVERNMENT POLICY IN THE DEVELOPMENT OF ROAD
INFRASTRUCTURE IN THE SERVICES PUPR (CASE STUDY IN
GUNUNG TOAR DISTRICT) KUANTAN SINGINGI DISTRICT 2024***

Tiara Etika Sari

Public Administration Study Program, Faculty of Social Sciences

Kuantan Singingi Islamic University

ABSTRACT

Development is a benchmark for the development of an area. The regional autonomy that the government has intensified has resulted in most regions throughout Indonesia carrying out development in all sectors, both informal and formal. Development of Gunung Toar District, Kuantan Singingi Regency. The research method in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interview observation. The results of the research show that the regional government of Gunung Toar District has fulfilled the RPJM guidelines. This can be seen from the role of local governments in carrying out road construction in accordance with the medium-term development plan (RPJM). The indicators for planning, implementation and supervision of road infrastructure development in Gunung Toar sub-district have been running well and have been implemented in accordance with the planning and objectives as desired by both the PUPR service and the government. Development in Gunung Toar sub-district has been carried out well.

Keywords: Government Role, Road Infrastructure Development

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO.....	iii
KATA PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Teori	8
2.1.1 Teori /Konsep administrasi negara	8
2.1.2 Teori /Konsep Organisasi	10
2.1.3 Teori /Konsep Manajemen	12
2.1.4 Teori /Konsep Kebijakan Publik.....	14
2.1.5 Teori /Konsep Pembangunan.....	18
2.1.6 Teori /Konsep Pemerintahan Daerah.....	21
2.1.7 Teori/Konsep Klasifikasi Jalan	24
2.2 Kerangka Pemikiran	26
2.3 Hipotesa Kerja.....	27

2.4 Definisi Operasional	27
2.5 Operasional Variabel	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Infoman Penelitian.....	30
3.3 Sumber Data	31
3.3.1 Data Primer.....	31
3.3.2 Data Sekunder.....	31
3.4 Fokus Penelitian.....	31
3.5 Lokasi Penelitian.....	31
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6.1 Observasi	32
3.6.2 Wawancara.....	32
3.6.3 Dokumentasi	32
3.6.4 Triangulasi	33
3.7 Metode Analisis Data.....	33
3.7.1 Pengumpulan Data	34
3.7.2 Reduksi Penyajian	34
3.7.3 Pengambilan Keputusan Atau Verifikasi	34
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	36
4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Gunung Toar	36
4.2 Letak Geografis.....	37
4.2.1 Batas Wilayah.....	37
4.2.2 Luas Wilayah.....	37
4.3 Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	39
4.3.1 Visi.....	39
4.3.2 Misi	41
4.4 Kependudukan.....	41

4.5 Sarana Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Toar.....	42
4.6 Program Pembangunan	43
4.7 Struktur Organisasi Kantor Camat Gunung Toar	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
5.1 Identitas Responden	45
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia.....	46
5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
5.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	47
5.2.1 Indikator Perencanaan	47
5.2.1.1 Penentuan Program Pembangunan	48
5.2.1.2 Pelaksanaan Dengan Cepat Dan Tepat.....	49
5.2.1.3 Pelaksanaan Dengan Jaminan Biaya.....	50
5.2.2 Indikator Pelaksanaan.....	51
5.2.2.1 Waktu Pelaksanaan Pembangunan	52
5.2.2.2 Alokasi Anggaran Pembangunan.....	53
5.2.2.3 Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Jalan	54
5.2.3 Indikator Pengawasan.....	55
5.2.3.1 Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan.....	56
5.2.3.2 Pemeliharaan Mutu Bangunan.....	57
5.2.3.3 Penilaian Pasca Pembangunan	58
5.3 Observasi	59
5.4 Analisis Penelitian Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas PUPR (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025	60
5.4.1 Indikator Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi	60
5.4.2 Indikator Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan	

Singingi.....	62
5.4.3 Indikator Pengawasan Pembangunan Infrastruktur	
Jalan Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan	
Singingi.....	63
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan.....	64
6.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
I.1 Data laporan infrastruktur jalan di kecamatan gunung Toar tahun 2025	5
II.1 Operasional Variabel Penelitian Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2025	28
III.1 Informan Penelitian	30
III.2 Jadwal penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2025	35
IV.1 luas Wilayah Kecamatan Gunung Toar	37
IV.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Toar.....	42
IV.3 Program Bantuan Pembangunan Desa Di Kecamatan Gunung Toar	43
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
V.2 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Umur.....	46
V.3 Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2024	26
IV.1 Peta Wilayah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi	38
IV.2 Struktur Organisasi Kantor Camat Gunung Toar	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat Sebagian besar daerah- daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun formal. Salah satunya adalah peningkatan pelayanan transportasi darat berupa pembangunan jalan.

Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik dipusat maupun di daerah. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan yang berskala besar. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara langsung maupun tidak berlangsung pembangunan jalan ini mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki peran penting untuk kemaslahatan masyarakat. Bagaimana tidak, pemerintah daerah merupakan elemen dasar bagi terbentuknya suatu sistem dan tata kelola untuk membangun suatu wilayah. Pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bertanggung jawab atas pembangun disuatu daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Hal tersebut, erat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah terkait Alokasi Anggaran dan Politik

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi terkait pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Toar bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan pasar. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur, termasuk melalui dana dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sumber pendanaan lainnya.

Program ini fokus pada perbaikan dan pembangunan jalan yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, terutama jalan yang kondisinya kurang baik. Selain itu, pemerintah daerah sering kali bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendapatkan dukungan teknis.

Kebijakan pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur jalan di tingkat daerah, seperti di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, berpedoman pada beberapa regulasi nasional yang mendasari perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Kondisi Jalan.
3. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diharapkan berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah pusat untuk mengidentifikasi prioritas jalan yang memerlukan pembangunan atau perbaikan. Penggunaan anggaran yang transparan

dan sesuai prioritas akan membantu tercapainya pembangunan jalan yang merata dan tepat guna bagi masyarakat di Kecamatan Gunung Toar.

Perkiraan anggaran dana untuk infrastruktur jalan di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, tergantung pada panjang jalan yang akan dibangun atau diperbaiki, tipe jalan (jalan aspal, beton, atau tanah), serta kebutuhan tambahan seperti jembatan, drainase, atau fasilitas lainnya.

Sebagai gambaran umum, untuk pembangunan jalan aspal dengan standar jalan provinsi, estimasi biaya biasanya berada di sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar per kilometer, tergantung pada kondisi geografis dan aksesibilitas daerah. Untuk jalan beton, biayanya bisa lebih tinggi, yaitu sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 6 miliar per kilometer.

Untuk mendapatkan angka yang lebih akurat, diperlukan data panjang jalan yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta perincian dari dokumen anggaran daerah atau Kementerian PUPR yang terkait dengan proyek di Kecamatan Gunung Toar.

Beberapa fenomena yang aktual dan berkembang di masyarakat, yakni; membahas Pemerintahan daerah, Alokasi Anggaran, dan Politik Anggaran. Adanya keterkaitan Pemerintahan Daerah dalam melakukan suatu kebijakan yang akan berdampak bagi masyarakat luas. Untuk membahas lebih dalam ada beberapa teori yang menunjang antara lain; teori Alokasi Anggaran yakni membahas bagaimana proses Alokasi Anggaran dilakukan, serta Politik Anggaran yang membahas dan mengupas lebih dalam yakni; adakah aktor-aktor politik anggaran terkait.

Berbagai masalah yang terjadi di masyarakat muncul berdasarkan sebab dan akibat yang terjadi, tidak terkecuali yang terjadi pada pemerintahan daerah. Pertama, tidak konsisten dalam perencanaan dan penganggaran daerah. kedua, pengelolaan keuangan daerah yang tidak menyeluruh. Hal ini merupakan kecacatan bagi pemerintahan daerah dan menimbulkan ketidakpercayaan ataupun kesenjangan masyarakat terhadap pengelola pemerintahan daerah. Alokasi anggaran menjadi tidak lanjut jika pemerintahan daerah membuat suatu kebijakan yang disusun secara benar dengan skala prioritas tertentu dalam membangun suatu daerah. Melihat realita infrastruktur jalan yang ada di kecamatan Gunung Toar sudah cukup baik dan masih ada jalan yang butuh perbaikan dan pengembangan. Hal ini menuai tanggapan masyarakat sekitar, maupun para pengendara yang melintasi jalan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa pemerintahan kecamatan Gunung Toar kurang serius dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan tersebut.

Penulis beranggapan minimnya sarana infrastruktur jalan menjadikan pelajar mengalami keterlambatan serta kecelakaan yang terjadi. Hal ini menjadi penting ketika para siswa dan siswi ingin mengetahui suatu hal mengenai pelajaran atau pengetahuan lainnya selain dari guru mereka. Maka dengan demikian menjadi penting bagi keberlangsungan pendidikan yang lebih baik, dan hal ini menjadi indikator bagi pemerintahan kecamatan Gunung Toar untuk memperbaiki sarana dan prasarana bagi siswa dan siswi di Kecamatan Gunung Toar.

Kecamatan Gunung Toar di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, memiliki luas wilayah sekitar 165,25 km². Informasi spesifik mengenai total panjang jalan di Kecamatan Gunung Toar tidak tersedia dalam sumber yang ada. Namun, terdapat beberapa proyek pembangunan jalan produksi di desa-desa dalam kecamatan ini, seperti tabel di bawah ini.

Tabel I.1 : Data laporan infrastruktur jalan di kecamatan gunung Toar tahun 2025

Nama Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)	Nama OPD
1.Peningkatan jalan menuju puskesmas rawat inap Kec.gunung toar (170 m)	Rp 600.000.000,00	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
2.Peningkatan jalan belakang kantor camat Kec.gunung Toar (200 m)	Rp 2.398.840,00	Dinas kebudayaan dan penataan ruang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025

1. Peningkatan jalan menuju puskesmas rawat inap Kec. gunung toar

Peningkatan jalan menuju puskesmas bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan public dan kualitas hidup masyarakat khususnya masyarakat gunung toar dapat lebih mudah melalui akses jalan tersebut.

2. Peningkatan jalan belakang kantor camat Kec. gunung Toar (aspal)

Peningkatan jalan di belakang kantor camat bertujuan untuk mempermudah para pegawai kantor untuk pergi ke kantor camat.

Masyarakat mulai menyimpulkan kegagalan pembangunan Infrastruktur jalan, karena adanya indikasi korupsi, kolasi dan nepotisme (KKN) di kalangan pemerintahan baik Kabupaten maupun Kecamatan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menentukan judul penelitian **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DINAS PUPR (STUDI KASUS DI KECAMATAN GUNUNG TOAR) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024.**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas PUPR (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan sebagai kelengkapan menyelesaikan studi Strata satu (S1) Administrasi Negara, Serta menganalisa permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta informasi bagi pemerintahan pemda Kuantan Singingi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori/konsep Administrasi Negara

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. (Sahya Anggara, 2015:11). Secara harfiah, administrasi berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris) atau *administratie* (bahasa Belanda). Istilah administrasi sebagaimana yang dikenal di Indonesia dewasa ini, berasal dari Eropa Barat melalui penjajahan Belanda. Setelah ditelusuri istilah ini berasal dari bangsa Romawi. Istilah administratif dari bahasa Belanda mempunyai dua arti. Pertama, menunjuk pada kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam pekerjaan pencatatan, korespondensi, perhitungan, kearsipan dan semacamnya yang lazim dilakukan dalam tugas kesekretariatan atau tata usaha suatu organisasi. Kedua, menunjuk pada penyelenggaraan pemerintahan.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik (Muhammad, 2019:1). Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu

pekerjaan yang terus berlangsung lama seperti memberikan bahan-bahan, sarana-sarana, instruksi-instruksi dan penciptaan iklim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (Sahya Anggara, 2016:4).

Aktivitas mengendalikan pemerintahan dikenal pula dalam istilah *bestuur*, yang ilmunya dikenal dengan sebutan *bestuurskunde*, ilmu pemerintahan. *Bestuurskunde* adalah ilmu yang mempelajari cara yang setepatnya untuk menyusun dan memimpin perangkat pemerintah, menentukan hubungan antara sesama aparat dan antara aparat dengan warga negara melalui peraturan-peraturan hukum yang disebut *bestuursrecht* atau hukum pemerintahan. (Ayi Karyana, 2016:22). Dari rumusan pembukaan UUD 1945 tersirat adanya tujuan nasional/ negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu :

- b. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- c. Memajukan kesejahteraan umum.
- d. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Dengan demikian maka tujuan nasional dan tujuan negara adalah identik. Sistem

Administrasi Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, malah keduanya tidak dapat dipisahkan.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Definisi organisasi seringkali dirumuskan sesuai kepentingan dan tujuan penelitian serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seseorang yang merumuskannya. Terdapat puluhan atau bahkan mungkin lebih mengenai definisi organisasi. Sebagai contoh, berikut beberapa definisi organisasi yang dikutip dari beberapa tulisan. (Machmoed Effendhie, 2016:1-90). Terdapat kutipan pengertian organisasi sebagai berikut. Louis A. Allen : “Organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan”. Dengan demikian organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas (wujud) sosial yang dikoordinasikan secara sadar oleh sekelompok orang secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai seorang diri.

Definisi-definisi lain tentang perilaku organisasi, antara lain dikatakan perilaku organisasi adalah telaah dan terapan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak didalam organisasi. Perilaku organisasi adalah sarana manusia bagi keuntungan manusia. Perilaku organisasi dapat diterapkan secara luas dalam perilaku orang-orang disemua jenis organisasi, seperti bisnis, pemerintahan, sekolah, dan organisasi jasa. perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis

tentang perilaku, struktur, individu, kelompok dan proses di dalam organisasi. Dalam fungsi pengorganisasian, seorang manajer atau pimpinan organisasi akan mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu.

Kerangka kerja tersebut dinamakan desain organisasi. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi itu dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi dari pimpinan dalam melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat di koordinasikan dan di komunikasikan. (Machmoed Effendhie, 2016:1-90).

Tujuan organisasi harus merupakan tujuan bersama dari seluruh anggota organisasi, sehingga seluruh anggota organisasi harus saling bahu membahu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan mereka semua. Agar tercapai tujuan yang sama, menjadi penting bagi pengelola organisasi untuk mengajak duduk bersama seluruh anggota untuk merumuskan dan bersepakat menentukan apa yang ingin dicapai organisasi. Membangun tujuan bersama sebagai tujuan organisasi merupakan hal mendasar dan sangat penting bagi eksistensi sebuah organisasi.

Organisasi sebagai suatu entitas tempat beberapa orang berkumpul harus benar-benar dipahami keberadaanya, dengan mengenal dan memahami organisasi memungkinkan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

2.1.3 Teori / Konsep Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:

Follet (dalam Wijayanti, 2019:1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner (dalam Wijayanti, 2008:1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Gulick (dalam Wijayanti, 2019:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Menurut Schein (2019:2) manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para professional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para professional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Menurut Terry (2019:1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan

cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan yang pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer.

Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni *man, money, method, machine, market, material dan information*.

- 1) *Man* : Sumber daya manusia
- 2) *Money* : Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan
- 3) *Method* : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan
- 4) *Machine* : Mesin atau alat untuk berproduksi
- 5) *Material* : Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan
- 6) *Market* : Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi
- 7) *Information* : Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan

2.1.4 Teori/Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye (2014:18), adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public Policy is whatever governments choose to do or not to do). Sedangkan menurut Charles O.Jones (2003:3), istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Pemahaman yang diperjelas oleh Richard Rose (2014:7), yakni bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Beberapa definisi diatas merupakan berbagai macam bentuk dari pemikiran-pemikiran pakar politik, akan tetapi definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil didalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Sebagai contohnya pelaku kebijakan yakni kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih, dan para analisis kebijakan.

Sebagai rentetan kebijakan publik sangatlah banyak, maka dapat dikelompokkan secara sederhana menjadi tiga:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau kebijakan ini dapat berupa bentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam definisi Thomas Dye (2020:17), mengandung makna bahwa: pertama, Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui adanya jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Dengan kata lain semua hal yang pemerintah ketahui termasuk infrastruktur jalan, akan tetapi pemerintah tidak mencanangkan perbaikan jalan pada jalan disuatu wilayah tertentu maka pemerintah sudah membuat kebijakan. Dan sebaliknya jika pemerintah mengetahui dan membuat kebijakan mengenai infrastruktur jalan dan merencanakan perbaikan serta membuat kebijakan untuk diperbaiki, dengan demikian pemerintahpun sudah membuat kebijakan.

Teori kebijakan publik menjadi teori yang sangat mendukung demi kelancaran penelitian guna melengkapi data serta sumber yang mungkin perlu diketahui.

Jenis Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah. Keempat, Peraturan Presiden. Kelima, Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan.

2. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

3. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu.

Tahapan Kebijakan Publik

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.1.5 Teori/Konsep Pembangunan

Peraturan Menteri dalam negeri No. 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan Desa/Kelurahan disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan badan permusyawaratan Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya Desa/Kelurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa/Kelurahan.

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh

suatu Bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. “Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna:

- (a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir
- (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus
- (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan
- (d) pembangunan mengarah kepada modernitas
- (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan dan pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran dan perluasan wawasan manusia (Rohman, 2017).

Pembangunan merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bila itu terkait usaha usaha memajukan kehidupan masyarakat. Pada awalnya, konsep itu lebih banyak dikaitkan dengan kemajuan material atau ekonomi. Namun, saat ini, konsep pembangunan telah mengalami

pergeseran makna ke arah yang lebih bermultidimensi.

Dengan demikian, masalah pembangunan juga harus didekati dengan memanfaatkan berbagai disiplin ilmu. Salah satu konsep pembangunan yang sangat populer di Indonesia adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam GBHN 1993, yang mengemukakan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Konsep pembangunan ini mengandung arti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau fisik seperti kecukupan pangan, sandang perumahan, dan kesehatan, tetapi juga aspek batiniah atau non fisik, seperti pendidikan, rasa aman, kebebasan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, dan rasa keadilan.

Dengan demikian, konsep pembangunan sesuai dengan GBHN adalah rangkaian upaya perubahan dalam semua aspek kehidupan bangsa seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan seperti yang dikemukakan oleh Bryant dan white (Efendi, dkk., 2016), mengandung 3 aspek:

1. Pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas(capacity), kepada apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut serta energi yang diperlukan untuk itu.
2. Pembangunan harus menekankan pada pemerataan (equity), perhatian yang tidak merata pada berbagai kelompok masyarakat.
3. pembangunan menekankan pada pertumbuhan. Karena konsep

kelangsungan dan kelestarian ini, untuk memajukan dan membangun pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah usaha yang secara sadar dilaksanakan terhadap suatu usaha atau rangkaian yang sangat penting diperhatikan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus serta perencanaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan

2.1.6 Teori/Konsep Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. 19 Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan itu peran Pemerintahan Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pemerintahan Daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Untuk peranan pemerintah dapat dilihat dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan (Simbolon, 2021). Untuk lebih jelasnya perhatikan berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses awal dimana pemerintah merencanakan apa yang hendak dibangun. Dalam perencanaan ini pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan masyarakat

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh, sebab pemerintah dikatakan berhasil apabila berhasil dalam mencapai dikerjakan dan hasilnya bagus. Pada pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pemerintah (desa/kelurahan) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

3. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diartikan untuk menghindari penyelewengan anggaran melalui anggaran pemerintah. Pengawasan adalah penilaian hasil akhir dari seluruh kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan.

Dari uraian di atas ditarik kesimpulan peran pemerintah yaitu sebagai pengatur, fungsi, kebijakan di suatu daerah dalam memajukan pertumbuhan maupun ekonomi.

Sebagai unsur pemimpin pelaksanaan urusan pemusatan pemerintah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Peran

pemerintah daerah dimaksudkan melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Di Indonesia, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota.

Anggaran harus diperjelas sebagai dokumen politik untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas kepada masyarakat diantara kepentingan yang sangat kompleks, kompetitif, dan konflikual. Anggaran juga mempunyai pengertian sebagai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Dalam proses penganggaran seringkali diwujudkan dalam berbagai cara yang lebih menekankan kepada dimensi politik, kemudian anggaran didistribusikan dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan pembangunan khususnya infrastruktur jalan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pada tingkat Kecamatan pelaksanaan lanjut dari APBD tersebut dibahas melalui Musrenbang Kecamatan untuk mendapatkan masukan, konfirmasi, klarifikasi, berbagai prioritas kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang desa/kelurahan.

2.1.7 Teori/Konsep Klasifikasi Jalan

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan umum menurut fungsinya berdasarkan pasal 8 Undang-undang No 38 tahun 2004 tentang Jalan dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Didalam pasal 6 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan bahwa fungsi jalan terdapat pada sistem jaringan jalan

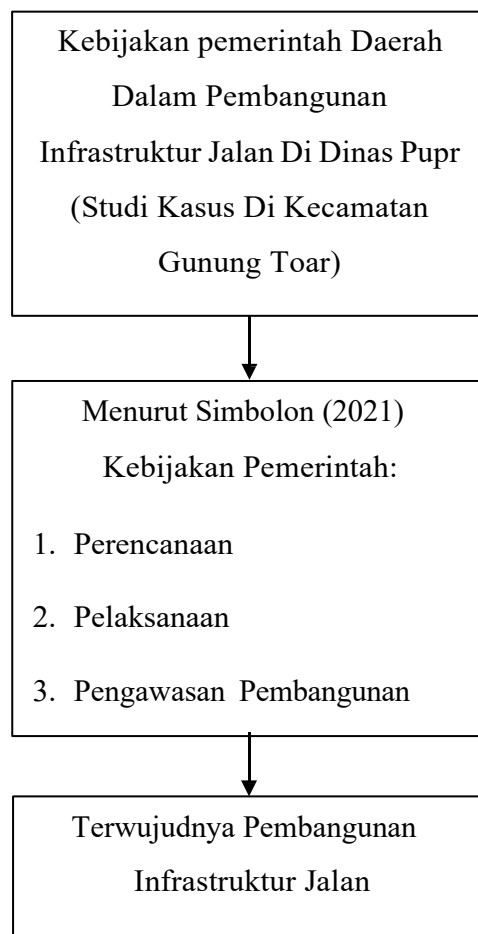
primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang merupakan bagian dari Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kawasan perkotaan, yang diatur secara berjenjang sesuai dengan peran perkotaan yang dihubungkannya. Untuk melayani lalu lintas menerus maka ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kawasan perkotaan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarkawasan di dalam perkotaan yang diatur secara berjenjang sesuai dengan fungsi kawasan yang dihubungkannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pemikiran nya sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas PUPR (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.



Sumber: Modifikasi peneliti tahun 2025

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan biasanya disusun dalam kalimat pernyataan sementara, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut “Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas PUPR (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.” karena masih ada pembanguann infrastruktur jalan yang belum terlaksana dengan baik.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan memahami arah penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan maka perlu di operasionalkan konsep sebagai berikut :

2.4.1 Perencanaan pembangunan

Adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di daerah guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

2.4.2 Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur

Merupakan bentuk wujud terlaksanaanya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.

2.4.3 Pengawasan

Adalah proses mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

2.4 Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

Konsep	variabel	Indikator	Sub Indikator	Item Penelitian
Analisis	Kebijakan Publik	1.Perencanaan	a. Penentuan Program Pembangunan	Baik
			b. Pelaksanaan dengan cepat dan tepat	Sangat Baik
			c. Pelaksanaan dengan jaminan biaya	Cukup Baik
		2.Pelaksanaan	a. Waktu Pelaksanaan	Kurang Baik
			b. Alokasi Anggaran	Baik
			c. Efektivitas	Sangat Baik
		3.Pengawasan	a. Keterlibatan Masyarakat	Cukup Baik
			b. Pemeliharaan Mutu Bangunan	Baik
			c. Penilaian Pasca Pembangunan	Sangat Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti Tahun 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu berusaha memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti yaitu Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya sehingga memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Menurut Newman (2020:225) menjelaskan, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu data yang umum seperti angka tetapi meninggalkan data dalam berbagai bentuk ukuran dan wujud yang tidak standar. Sementara data numerik mengubah informasi ke dalam format standar dan ringkas. Penelitian kualitatif juga menerangkan konsep sebelum pengumpulan produktif, beragam, dan tidak standar. Dalam penelitian kualitatif, data kadang-kadang berbentuk angka, lebih sering data merupakan kata-kata tertulis atau lisan, tindakan, bunyi, simbol, benda fisik atau gambar visual misalnya, peta, foto, video. Penelitian kualitatif tidak mengkonversi semua pengamatan menjadi media tunggal data, akan tetapi, banyak konsep yang digunakan akan terus dikembangkan dan disempurnakan selama atau setelah proses pengumpulan data. Kita menguji kembali dan merenungkan data dan konsep secara simultan dan interaktif. Sewaktu mengumpulkan data, kita secara simultan menghasilkan ide-ide baru. Ide-ide baru

memberikan arahan dan menyarankan cara-cara pengukuran baru. Sebaliknya, cara-cara pengukuran baru tersebut membentuk cara kita mengumpulkan data tambahan. Singkatnya kita menjembatani ide dengan data dalam proses yang interaktif dan kelanjutan. Neuman (2020:226)

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Sukandarumidi (2021:65).

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis.

Tabel III.1: Informan Penelitian

No	Nama Responden	Jumlah		Persentase
		Informan	Jumlah	
1	Sekretaris PUPR	1	1	100%
2	Kabid Binamarga	1	1	100%
3	Kasi PMD	1	1	100%
6	Masyarakat	4	4	100%
Total		7	7	100%

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang di gunakan, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui pengamatan sendiri, maupun melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisisioner yang di teliti dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini masyarakat kecamatan Gunung Toar.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari monografi, literatur, dan buku. Selain itu juga, data sekunder bisa diperoleh melalui foto-foto yang berhubungan dengan penelitian di lapangan.

3.4 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh data, fakta, dan informasi di lapangan, peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Menurut Sugiyono (2015:166) observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.

3.6.2 Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban”. Moleong (2016:186).

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumendokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis”. Burhan (2014:122).

3.6.4 Triangulasi

Menurut Newman (2020:186) triangulasi adalah mengukur jarak antar objek dengan melakukan pengamatan dari beberapa posisi. Dengan mengamati objek dari beberapa sudut pandang yang berbeda, para surveyor dapat memperoleh objek yang benar.

Norman K. Denkin (dalam Mudjia Rahardjo, 2014:35) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana Menurut Miles dan Huberman (2017:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi lapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna Sujana (dalam Sujarweni, 2014:5).

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu, sebagaimana dinyatakan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada ide itu (Bogdan dan Taylor, 2015:254). Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses

pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2015:255) analisis data meliputi :

3.7.1 Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.7.4 Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Data pokok penelitian ini mengacu pada Pelayanan Publik yang diterima oleh masyarakat.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal Penelitian Tentang Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel III.2 berikut :

Tabel III.2: Jadwal penelitian tentang Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas Pupr (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2024/2025															
		Sep/Oktober				Nov/Des				Jan-juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan judul																
2.	Pembuatan proposal																
3.	Bimbingan Proposal																
4.	Ujian Proposal																
5.	Revisi proposal																
6.	Bimbingan Skripsi																
7.	Ujian Skripsi																
8.	Revisi Skripsi																

Sumber: Modifikasi Peneliti Tahun 2025

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Gunung Toar

Kecamatan Gunung Toar adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan ini memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan budaya dan tradisi masyarakat Kuantan Singingi yang kaya akan adat istiadat. Nama "Gunung Toar" diduga berasal dari keberadaan sebuah bukit atau gunung kecil yang menjadi ciri khas wilayah ini, yang oleh masyarakat setempat disebut "Gunung Toar". Wilayah ini dikenal dengan keindahan alamnya, termasuk sungai-sungai kecil dan hutan-hutan yang masih asri. Secara historis, masyarakat Gunung Toar adalah bagian dari masyarakat adat yang hidup berdasarkan sistem adat dan hukum tradisional. Kawasan ini dulunya merupakan bagian dari kerajaan kecil yang ada di Kuantan Singingi, yang berperan penting dalam menjaga tradisi Melayu Riau.

Kecamatan ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya kelapa sawit, karet, dan padi, yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Selain itu, Gunung Toar juga memiliki daya tarik wisata alam, seperti gua-gua dan bukit yang sering menjadi destinasi para pelancong lokal. Adanya adat "Pacu Jalur," salah satu tradisi budaya terkenal di Kabupaten Kuantan Singingi, juga turut menjadi identitas kebanggaan masyarakat Gunung Toar, meskipun tradisi ini lebih luas dikenal di kecamatan tetangganya. Pacu Jalur merupakan perlombaan perahu tradisional yang sudah diakui sebagai warisan budaya.

4.2 Letak Geografis

Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya dimuka bumi. Letak geografis biasanya di batasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut.

Kecamatan Gunung Toar merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 12.692 jiwa dengan luas wilayah 165.25 Km² dan terdiri dari 13 desa/kelurahan.

4.2.1 Batas Wilayah

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Hulu Kuantan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah

4.2.1 Luas Wilayah

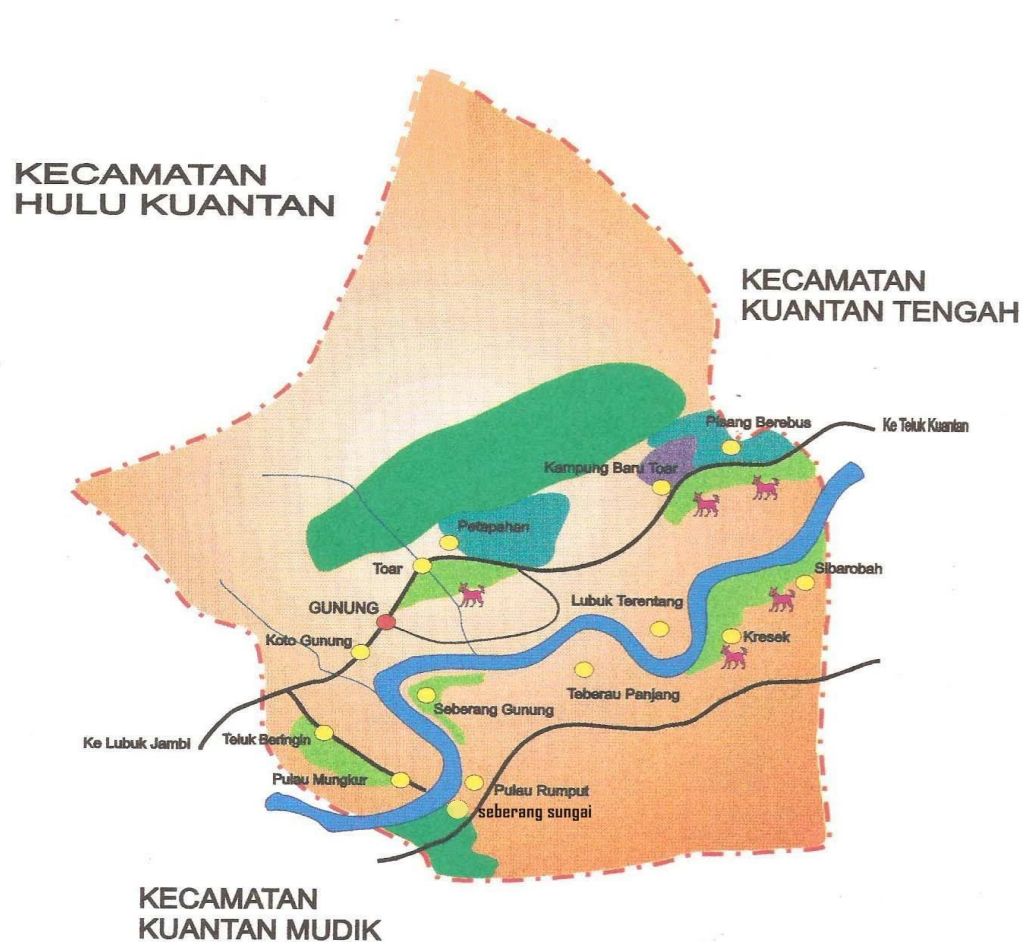
Tabel IV.1 luas wilayah kecamatan gunung toar

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS (Km ²)
1	Pulau Rumput	13.15
2	Koto Gunung	12.70
3	Teluk Beringin	13.30
4	Pulau Mungkur	12.85
5	Seberang Gunung	13.30
6	Teberau Panjang	13.00
7	Gunung	12.10

8	Toar	12.00
9	Kampung Baru	12.20
10	Petapahan	12.20
11	Lubuk Terentang	11.00
12	Sibarobah	14.00
13	Pisang Berebus	13.45
Total Luas		165.25

Sumber: Kantor Camat Gunung Toar Tahun 2025

Gambar IV.1 Peta wilayah Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi



4.3 Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

4.3.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan visi jangka menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sudah memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi pada tahap keempat (2020-2025), isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH)”

Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas adalah sebagai berikut :

1. **BERBUDAYA** mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal;
2. **RELIGIUS** mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang;

3. **MAJU** mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;
4. **BERWAWASAN** mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang prima;
5. **SEJAHTERA** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
6. **HARMONIS** mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang aman, selaras, serasi, seimbang antara semua komponen masyarakat serta pelaku pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah keberagaman masyarakat itu sendiri.

4.3.2 MISI

Dalam mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya dan bermartabat;
2. Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;
3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah;

Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

4.4 Kependudukan

4.4.1 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Untuk lebih lengkapnya jumlah penduduk kecamatan gunung toar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung toar

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Pulau Rumpit	635
2	Koto Gunung	653
3	Teluk Beringin	1.325

4	Pulau Mungkur	2.080
5	Seberang Gunung	522
6	Teberau Panjang	1.080
7	Gunung	846
8	Toar	830
9	Kampung Baru	1.298
10	Petapahan	1.388
11	Lubuk Terentang	815
12	Siberobah	384
13	Pisang Berebus	836
TOTAL		12.692

Sumber : Sensus penduduk 2025

4.5 Sarana Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Toar

Berdasarkan informasi yang tersedia, terdapat beberapa titik jalan rusak di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi. Namun, data spesifik mengenai panjang kerusakan jalan di setiap lokasi tidak disebutkan dalam sumber-sumber yang ada. Berikut adalah beberapa lokasi kerusakan yang teridentifikasi:

1. Desa Kampung Baru: Terdapat tiga titik jalan berlubang.
2. Desa Petapahan dan Desa Toar: Kondisi jalan mengalami kerusakan, namun detail panjang kerusakan tidak dijelaskan.
3. Akses jalan menuju Desa Seberang Gunung: Membutuhkan penimbunan dan pengaspalan. Bupati Kuantan Singingi telah menginstruksikan Dinas PUPR untuk segera memperbaiki jalan tersebut.

4.5 Program Pembangunan

Tabel IV.II Program Bantuan Pembangunan Jalan Desa Di Kecamatan Gunung

Toar

NO	DESA/KELURAHAN	PANJANG JALAN	JALAN ASPAL	JALAN BETON	JALAN TANAH	JALAN BAIK	JALAN RUSAK
1	Pulau Rumpit	3,5 km	2,0 km	1,0 km	0,5 km	2,7 km	0,8 km
2	Koto Gunung	4,0 km	1,5 KM	1,0 km	1,5 km	2,3 km	1,7 km
3	Teluk Beringin	3,3 km	1,8 km	0,5 km	1,0 km	2,0 km	1,3 km
4	Pulau Mungkur	3,7 km	1,2 km	1,5 km	1,0 km	2,4km	1,3 km
5	Seberang Gunung	4,2 km	2,2 km	1,0 km	1,0 km	3,0 km	1,2 km
6	Teberau Panjang	3,0 km	1,0 km	1,0 km	1,0 km	2,1km	0,9 km
7	Gunung	4,1 km	2,0 km	1,0 km	1,1 km	2,6 km	1,5 km
8	Toar	3,5 km	2,0 km	0,5 km	1,0 km	2,5 km	1,0 km
9	Kampung Baru	3,2 km	1,2 km	1,0 km	1,0 km	2,2 km	1,0 km
10	Petapahan	3,8 km	1,0 km	1,5 km	1,3 km	2,3 km	1,5 km
11	Lubuk Terentang	3,1 km	1,2 km	1,0 km	0,9 km	2,5 km	0,6 km
12	Siberobah	4,5 km	2,5 km	1,0 km	1,0 km	3,2 km	1,3 km
13	Pisang Berebus	3,4 km	2,0 km	0,7 km	0,7 km	2,7 km	0,7 km
Total		49,3 km	21,6 km	12,7 km	15,0 km	34,5 km	14,8 km

Sumber: Kantor Camat Gunung Toar Tahun 2025

4.6 Struktur Organisasi Kantor Camat Gunung Toar



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi ataupun analisis penelitian Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Dinas PUPR (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Toar) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 dapat di simpulkan bahwa pengawasan, pelaksanaan dan perencanaan sudah termasuk kategori baik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas di ajukan saran sebagai berikut :

- 6.2.1** Diharapkan pihak pemerintah daerah kepada masyarakat agar dapat memberikan kritik dan saran kepada pihak pemerintah daerah terkait pembangunan yang kami laksanakan belum sesuai dengan yang di harapkan masyarakat.
- 6.2.2** Masyarakat mengharapkan kepada pemerintah daerah agar terus melaksanakan pembangunan di kabupaten kuantan singingi ini khususnya di kecamatan gunung toar jika ada jalan atau bangunan lainnya yang rusak kami berharap pemerintah sesegera mungkin melakukan perbaikan untuk kenyamanan dan kelancaran kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Akib, K., & Tepare, O. A. (2017). *Peran pemerintah pembangunan infrastruktur jalan*
- Kessa dan wahyudin, 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*
- Kuncoro, M. (2011). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Akib, K., & Tepare, O. A. (2017). *Peran pemerintah pembangunan infrastruktur jalan..*
- Adamy Marbawi. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Aceh. Unimal Pres.
- Anggra Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Edison, dkk. 2016. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Hasibuan, S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kadarisman, 2012. *Manajemen Kompensasi*. Jakarta: PT.Gravindo Persada
- Simbolon, 2021, *Kerbijakan pemerintah daerah*
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barata, A. A. (2015). *Dasar - Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Ellex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

- Indrawan, R & Yaniawati, P. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moenir, H.A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja. 2010. *Komunikasi: Komunikasi dan hubungan masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta: Mitra Cendikia.
- Lijak Poltak Sinambela, 2006. *Pengertian Partisipasi, Bandung* : Gramedia
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Tanggung Jawab Kepala Desa dan Hubungan antara Partisipasi Dan*, Jakarta : Karya Dharma IIP
- Moekijat, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhoseumawe: Unimal pres
- Mujanah, Siti, 2019. *Manajemen Kompensasi*. Surabaya: CV. Putra Media
- Simarora Henry. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: SIE YKPN
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta: Bandung
- Wibowo, 2016. *Manajemen Kinerja, Edisi Kelima*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta-14240.
- Wukir. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah*. Yogyakarta: Multi Presindo

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Jurnal

Muliati, 2019, Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan
Negara Republik Indonesia. *Meraja Journal*. Vol.2 No.1

Isvandiari Any, Faudah L, 2017, Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi PG. Meritjan Kediri.
Jurnal JIBEKA. Volume 11 No. 1

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan kepala dinas PUPR



2. Wawancara dengan pegawai kantor PUPR



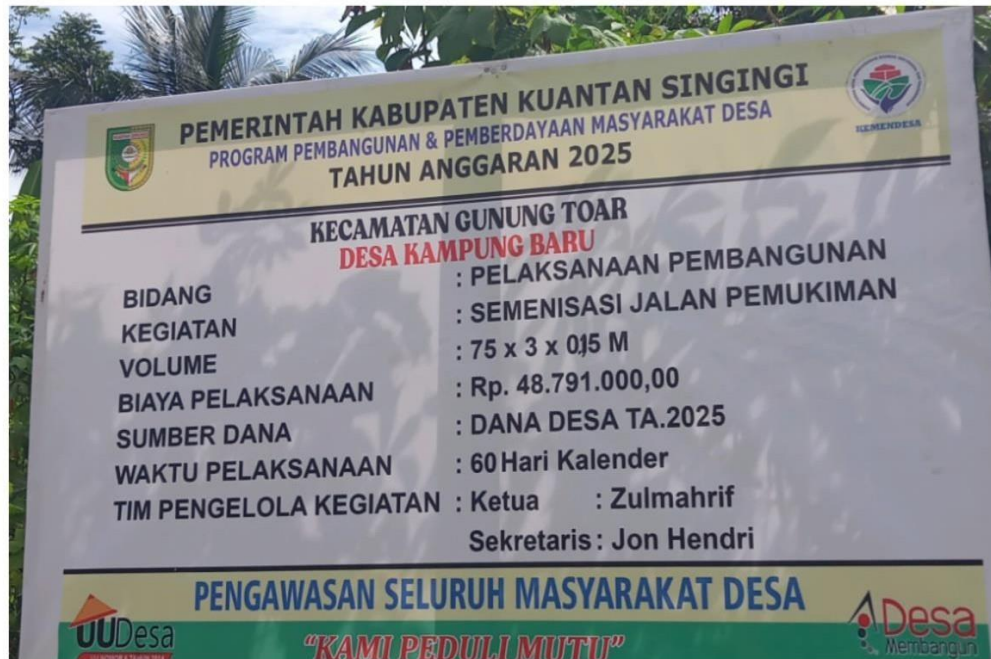
3. Wawancara dengan Kasi PMD Kantor camat gunung toar



4. Jalan akses menuju puskesmas dan kantor camat gunung toar



5. Pembangunan jalan semenisasi desa kampung baru kecamatan gunung toar



6. Akses jalan ke desa seberang gunung yang masih belum di bangun



